



100 Hari Kerja Menunggu Janji

YOGYAKARTA – KPU Yogyakarta telah menetapkan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi sebagai pasangan calon terpilih Pilwali Kota Yogyakarta 2017.

Meski belum resmi bekerja sebagai wali kota-wakil wali kota Yogyakarta periode 2017-2022 karena tahapan pelantikan masih diproses oleh DPRD Kota Yogyakarta dan Pemda DIY, masyarakat sudah menanti realisasi janji-janji dan program kerja yang ditawarkan Haryadi-Heroe saat masa kampanye lalu.

Haryadi yang berstatus petahana memastikan kemenangannya sebagai cambuk untuk lebih berbakti kepada warga Kota Yogyakarta. Salah satu langkah pertama yang akan dilakukannya adalah mewujudkan jaminan pendidikan dan pengobatan gratis.

"Langkah pertama yang saya dan Pak Heroe lakukan adalah menyapa warga Kota Yogya yang tidak bisa sekolah. Bagaimana mereka bisa mendapat pendidikan gratis. Selain itu, kami juga akan menyapa warga yang sakit namun tidak mampu berobat ke rumah sakit," katanya.

Namun, paslon yang diusung koalisi partai Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra itu belum bersedia memaparkan secara rinci program kerja 100 hari pertama maupun program prioritas. Haryadi beralasan program kerja baru akan disampaikan setelah resmi dilantik nanti.

Visi yang diusung oleh paslon nomor urut dua itu saat masa kampanye adalah menjadikan Kota Yogyakarta yang makmur, maju, berbudaya, religius, toleran, sebagai kota yang nyaman huni, kota pendidikan, dan kota pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.

Sementara itu, Heroe Poerwadi menilai pascapenetapan paslon terpilih oleh KPU pekan lalu menjadikan Kota Yogyakarta tak ada lagi istilah warga pendukung Haryadi-Heroe maupun pendukung Imam Priyono-Achmad Fadli. "Seluruhnya adalah warga kota Yogyakarta dan seluruhnya akan kamilayani," tandasnya.

Saat menjabat nanti, pihaknya tak hanya sebatas merealisasikan janji-janji maupun program kerja yang ditawarkan saat masa kampanye lalu saja, tapi juga akan mengakomodasi visi-misi maupun program kerja Imam-Fadli yang dirasa relevan untuk diwujudkan.

"Akan kita lihat apakah ada program paslon satu (Imam-Fadli) yang kemungkinan sama dan bisa kita diakomodasi. Karena kami yakin programnya pasti demi kebaikan Kota Yogyakarta," ucapnya.

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengaku pihaknya bersama Bappeda akan mencermati program dan janji Haryadi-Heroe saat kampanye lalu apakah bisa diakomodasi dalam APBD 2018. "Saat ini RAPBD 2018 dalam tahap perencanaan, apakah ada program dan kegiatan yang bisa dimasukkan dalam pagu anggaran, sedang kami kaji. Bappeda juga sudah mulai perencanaan 2018, mungkin tidak program wali kota terpilih diakomodasi," ungkapnya.

Pihaknya juga mendapat informasi rencana pertemuan antara Haryadi-Heroe selaku wali kota-wakil wali kota terpilih dengan penjabat wali kota. Dalam pertemuan tersebut akan disampaikan aspirasi sesuai visi-misi wali kota dan wakil wali kota terpilih.

(Ke Hal 7)

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanga
<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahu

(dari Hal 1

"Sekarang kan Bappeda sudah mulai perencanaan 2018, mungkin ada program Wali Kota terpilih yang bisa diakomodasi," ujarnya.

Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko menerangkan, meski calon yang diusung partainya kalah, posisi PDIP tetap strategis di pemerintahan baru mendatang. Sebabnya, PDIP sebagai partai peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Yogyakarta dengan menguasai 15 kursi dari total 40 kursi. Selain itu, PDIP juga menempatkan kadernya sebagai ketua Dewan.

"Kami harapkan kepala daerah nanti mau bekerja sama dengan kami. Karena kebijakan yang dimiliki kepala daerah ada yang harus disepakati bersama dengan dewan," ucapnya.

Meski demikian, secara kelembagaan PDIP belum memutuskan apakah menjadi partai oposisi atau tidak. "Prinsipnya jika kebijakan pro rakyat pasti kami dukung. Sebaliknya, jika tidak pro rakyat pasti akan kami kritisi dan kami tentang,"

papar Danang, yang juga duduk sebagai legislator di DPRD Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Fraksi PDIP itu.

Selain itu, jika melihat hasil Pilwali lalu, di mana posisi Haryadi-Heroe sebagai paslon terpilih hanya unggul dengan selisih tipis yaitu 0,6% atau 1.187 suara dari Imam-Fadli, menurut Danang juga menunjukkan konstituennya cukup besar dan harus diakomodasi aspirasinya oleh pemerintahan yang baru nanti.

Isu Lingkungan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta Halik Sandera menilai apakah janji paslon terpilih akan benar-benar diwujudkan selama periode kepemimpinannya bisa terlihat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta lima tahun ke depan. Dia berharap salah satu yang harus menjadi fokus utama adalah isu lingkungan.

"Kebijakan yang harus menjadi dasar pembangunan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," ujarnya

kemarin.

Halik meminta ada pengawasan lebih ketat dalam penataan ruang kota ke depan. Salah satu kajiannya daya dukung lahan apakah sudah terlampau atau tidak. Hal lainnya yang harus dilihat adalah aspek tata ruangnya, misalnya saat terdapat permukiman padat seharusnya tidak ada izin yang dikeluarkan untuk pembangunan skala besar.

Masifnya pembangunan di wilayah perkotaan akan diikuti oleh kebutuhan air tanah yang banyak, bertambahnya limbah, serta pemakaian energi yang semakin meningkat.

Terlebih secara kasatmata, tak sedikit hotel-hotel berdiri di pinggir sungai yang berpotensi menambah tingkat pencemaran sungai. Tiga tahun terakhir ini juga muncul keluhan dari warga jika debit air sumurnya menurun akibat keberadaan hotel di tengah permukiman.

"Dampak lainnya, konflik sosial di lapangan antara warga dengan investor mencuat seiring maraknya pembangunan skala besar tersebut," papar Halik.

Dia menyarankan adanya pengendalian dan pemulihan lingkungan di kota seluas kurang lebih 32,5 kilometer persegi ini. Termasuk menambah ruang terbuka hijau dengan jumlah yang ideal. Apalagi, Kota Yogyakarta mulai memperlakukan Perda 2/2016 tentang Rumah Susun (Rusun) yang di dalamnya memberi ruang investor mendirikan rumah susun komersial atau apartemen.

Perda tersebut diakuinya menjadi ancaman karena daya dukung lahan di Kota Yogyakarta tak mampu lagi menampung pembangunan berskala besar. "Meski moratorium hotel masih berjalan, ada Perda 2/2016 yang menjadi legitimasi munculnya apartemen di Yogyakarta. Perda secara normatif membuka pintu bagi investor," ungkapnya.

Di sisi lain, janji-janji Haryadi-Heroe selama masa kampanye lalu ternyata belum bisa terealisasi pada 2017 ini. Bahkan, semester pertama 2018 kemungkinan belum bisa diwujudkan. Hal itu dikarenakan proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)

2018 sudah bergulir dan akhir Mei nanti dijadwalkan sudah selesai untuk ditetapkan menjadi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD 2018.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengatakan, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri, dimulainya tahapan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi wali kota-wakil wali kota terpilih adalah enam bulan pas capelantikan.

Jika pelantikan dilaksanakan Mei ini, kemungkinan pembahasan baru berjalan November atau masuk fase ketiga. Selama masa transisi tersebut maka kegiatan akan berpedoman pada musrenbang yang lama.

"Itu sesuai Perda RPJMD Nomor 7/2012. Jadi kemungkinan baru efektif pada 2019 nanti, atau bisa diselaraskan dalam (APBD) perubahan 2018," paparnya.

©ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005